

PERAN PEREMPUAN DALAM AKSI LINGKUNGAN DAN KETAHANAN PANGAN

*Hartuti Purnaweni **

A. PENDAHULUAN

Sejak dasawarsa 1980-an, masalah lingkungan dan ketahanan pangan merupakan isu penting dalam pembangunan nasional. Perhatian terhadap kedua isu penting tersebut dapat ditunjukkan dari kemauan pemerintah yang secara formal membentuk Kementerian Negara Lingkungan Hidup walaupun secara politis keberadaan lembaga negara tersebut belum kuat. Selain itu juga melalui kemauan politik yang diwujudkan dalam berbagai kebijakan pertanian, pemerintah berupaya untuk mencapai swasembada pangan.

Memang pada tahun 1984 Indonesia meraih prestasi menjadi negara yang mampu berswasembada beras, dan memperoleh penghargaan dari Food and Agricultural Organization (FAO) pada tahun 1994. Akan tetapi setelah masa itu, pelan tetapi pasti predikat swasembada beras tidak lagi dapat dipertahankan, dan akhirnya Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor beras. Akibat yang ditimbulkan adalah makin seriusnya negeri ini menghadapi masalah ketahanan pangan.

Demikian pula yang terjadi pada ranah lingkungan. Indonesia menghadapi masalah lingkungan yang semakin serius dari hari ke hari. Menurut pakar lingkungan, Emil Salim (dalam Supriadi, 2005) meskipun pembangunan telah berjalan ratusan tahun akan tetapi baru pada awal tahun '70an orang mulai sadar dan cemas akan berbagai pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga masalah ini kemudian mulai mendapatkan perhatian dunia. Kesadaran ini mulai muncul ditandai dengan Konperensi Tingkat Tinggi World Commission on Environment and Development di Stockholm, Swedia pada tahun 1972.

Sekalipun kemudian Indonesia membentuk Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagai salah satu perwujudan dari keseriusan menangani permasalahan lingkungan hidup, namun dalam realitasnya berbagai kerusakan lingkungan yang cenderung makin parah tidak mampu dicegah. Makin intensifnya fenomena bencana banjir di semakin banyak kawasan di negeri ini, tanah longsor, kerusakan hutan, atau bencana-bencana lain yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan

bukan karena fenomena alam seperti misalnya gempa menunjukkan bahwa lembaga pemerintah ini tidak mempunyai kekuatan cukup untuk mencegah atau paling tidak mengurangi berkembangnya kerusakan lingkungan. Padahal, ketika lingkungan memburuk, ketahanan pangan dengan sendirinya akan terganggu. Permasalahan serius yang menuntut adanya kebijakan yang tepat untuk mengatasinya.

Setidaknya terdapat empat faktor yang menurut Todaro (1995) mendorong dimensi lingkungan dan ketahanan pangan menjadi masalah sekaligus perhatian dalam setiap perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan.

Keempat faktor tersebut menurut Todaro adalah

- (1) Kebijakan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi sehingga terjadi eksploitasi berlebih terhadap sumber daya alam;
- (2) Pertambahan penduduk yang tidak terkendali;
- (3) Kegagalan teknologi dalam konversi dan substitusi kemampuan penyediaan produk pengganti dan
- (4) Perilaku konsumtif yang dipacu oleh adanya kapitalisasi dan komodifikasi lingkungan.

Kegagalan untuk mengelola keempat faktor tersebut telah mendorong banyak negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi masalah serius di bidang lingkungan dan ketahanan pangan. Ditambah dengan munculnya fenomena pemanasan global dan krisis pangan dunia, maka persoalan lingkungan dan ketahanan pangan harus dicarikan pemecahannya secara komprehensif agar bencana lingkungan dan kelaparan massal tidak terjadi. Dengan demikian tidak pula perlu terjadi ramalan Malthus yang menyatakan bahwa bencana kelaparan akan terjadi di Bumi karena berlebuhnya pertumbuhan jumlah penduduk dibandingkan dengan pertumbuhan pemenuhan kebutuhan pangan (Mantra, 2003).

B. PEMBAHASAN

Pelibatan Perempuan

Negara atau pemerintah tidak akan dapat memecahkan persoalan lingkungan dan ketahanan pangan tanpa melibatkan pemangku kepentingan

(stakeholders) yang lain, yaitu swasta dan masyarakat. Prinsip *community development* dan *broad participatory* menjadi kebijakan pembangunan yang niscaya dilaksanakan. Prinsip kebijakan tersebut akan memberikan manfaat bagi pembangunan yang berkelanjutan (Vanek, 1989). Pertama, bagi negara akan mengurangi beban anggaran dan resiko politik kegagalan makro di bidang pertanian dan pangan. Kedua, bagi masyarakat, prinsip tersebut akan mendorong masyarakat untuk ikut terlibat dan bertanggungjawab terhadap kegiatan pembangunan.

Salah satu upaya penting pelibatan pemangku kepentingan, khususnya masyarakat, dalam mengatasi problema lingkungan dan ketahanan pangan adalah dengan menggandeng kaum perempuan baik secara individual maupun organisasional. Pelibatan kaum perempuan menjadi sangat penting dan strategis karena menurut Greece (1998), terdapat beberapa alasan, yaitu:

1. Kaum perempuan adalah yang pertama-tama dan terutama terkena implikasi dan dampak pembangunan.
2. Kelompok perempuan merupakan mayoritas penduduk yang terlibat dan bersinggungan dengan kedua bidang tersebut.
3. Upaya pemberdayaan kaum perempuan agar mempunyai kesetaraan dalam pengambilan kebijakan publik
4. Pelibatan kaum perempuan selain sebagai upaya kesetaraan gender, yang penting lagi adalah upaya penguatan demokratisasi.

Dalam studinya di berbagai negara sedang berkembang, Greece mengungkapkan temuan bahwa kelompok perempuanlah yang paling rentan terkena dampak negatif kerusakan lingkungan dan krisis pangan sedunia. Berbagai fakta yang muncul di tanah air jelas merefleksikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam klasifikasi ini. Masih tingginya tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan di negeri ini merupakan salah satu indikator kerentanan kelompok perempuan dalam menghadapi masalah lingkungan dan ketahanan pangan (Amiruddin dan Lita Purnama, 2005).

Sementara itu Vandana Shiva (1991) dalam penelitiannya di India mengungkapkan bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh implementasi kebijakan revolusi hijau di bidang pertanian, ternyata tidak saja membuat kelompok perempuan tidak mampu mempertahankan kelangsungan ekonomi rumah tangganya dan ketercukupan pangan sehingga kemudian memicu konflik sosial. Penggunaan pestisida dan bahan-bahan kimiawi berlebih di lahan pertanian telah

mempengaruhi fertilitas kaum perempuan.

Selanjutnya Shiva mengatakan bahwa "The large scale experiment of the green revolution has not only pushed nature to the verge of ecological breakdown, but also seems to have pushed woman in rural society to the verge of social breakdown". Revolusi hijau yang telah dengan telak menihilkan terbuktinya kekhawatiran Malthus dengan menunjukkan keberhasilan berbagai strategi pertanian yang kemudian mendorong produksi pangan, telah lama ditengarai berdampak buruk terhadap kemandirian wanita secara ekonomi dan sosial (Purnaweni, 1993).

Pada sisi lain, temuan tim ahli dari USAID dan GTZ (2004) dalam program-program bantuan pengembangan kapasitas (*capacity building*) di Indonesia mengungkapkan temuan bahwa pelibatan kelompok perempuan dalam menghadapi masalah lingkungan dan ketahanan pangan memberikan dampak positif terhadap pemecahan kaitan permasalahan-permasalahan tersebut. Dalam menghadapi masalah ketahanan pangan, pelibatan perempuan memberikan kontribusi dalam penanggulangan gizi buruk, busung lapar, penurunan tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan.

Dalam bidang lingkungan, keterlibatan perempuan baik secara individual maupun organisatoris telah lama berlangsung. Kisah Mak Ijah di Garut yang memperoleh penghargaan Kalpataru pada tahun 1997 merupakan bukti peran perempuan dalam penyelamatan lingkungan. Perempuan separo baya itu nekad memelopori penghijauan di sekitar Gunung Halimun karena tidak tahan terkena banjir dan tanah longsor tiap tahunnya sebagai akibat pengundulan hutan, merupakan gambaran bahwa perempuan tidak kalah dengan mitranya kaum laki-laki.

Demikian pula kisah seorang ibu rumah tangga, Murniwati, yang mempunyai "hobi aneh" karena sejak tahun 1998 dengan swadana mengerahkan para pembantu rumah tangga dan tukang kebunnya menanam puluhan ribu bakau di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk, lahan konservasi milik Departemen Kehutanan (Kompas, 8 Desember 2007). Ini membuktikan bahwa keterlibatan perempuan dalam penyelamatan lingkungan bukan pula sesuatu yang asing. Tentu masih banyak kisah-kisah lain keterlibatan perempuan dalam penyelamatan lingkungan yang tidak terpantau oleh media massa.

Demikian pula keterlibatan perempuan secara organisatoris dalam penyelamatan lingkungan, baik melalui organisasi seperti PKK, GOW, atau LSM Perempuan seperti Yayasan Nurani Bangsa. Organisasi-organisasi perempuan

ini secara periodik melaksanakan berbagai program penghijauan lahan kritis atau program penanganan sampah keluarga.

Sebenarnya telah banyak hal yang dilakukan perempuan dalam menghadapi masalah lingkungan dan ketahanan pangan. Perempuan pedesaan yang banyak bekerja di sektor off farm, secara tidak langsung memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah ketahanan pangan di wilayah pedesaan. Dengan memanfaatkan lahan sempit di sekitar rumahnya, para perempuan ini banyak mengembangkan tanaman pangan yang dapat dinikmati oleh keluarga, dan bahkan untuk kepentingan komersial yang diperdagangkan di pasar tradisional desa (Hayami and Kikuchi, 1987).

Daya Dukung Sosial Politik

Harus diakui bahwa keterlibatan perempuan dalam penyelamatan lingkungan dan ketahanan pangan masih bersifat sporadis, insidental dan tidak terstruktur dengan baik. Ini diakibatkan oleh daya dukung sosial politik yang kurang untuk menempatkan perempuan sebagai subyek dalam kebijakan pembangunan lingkungan dan pengembangan ketahanan pangan.

Dari sisi daya dukung sosial, keterlibatan perempuan dalam pembangunan lingkungan masih terkendala oleh nilai-nilai sosial yang resisten terhadap kehadiran perempuan. Kisah Mak Ijah dan isteri Ayong yang dicap oleh masyarakat sebagai "orang gila" pada awal melakukan penyelamatan lingkungan merupakan salah satu bukti resistensi nilai sosial tersebut. Belum lagi kendala internal rumah tangga dengan nilai patriarki yang masih sangat kental, yang membelenggu peran perempuan di luar sektor privat yang merupakan ranah tradisionalnya.

Pada aras politik, pemerintah belum memberikan daya dukung politik yang memadai bagi kelompok perempuan untuk terlibat secara intensif dalam pembangunan lingkungan dan pengembangan ketahanan pangan. Berbagai kebijakan yang dilaksanakan bahkan belum memberikan perlindungan yang signifikan bagi keterjaminan kaum perempuan itu sendiri.

Berbeda dengan pembangunan bidang politik. Kelompok perempuan secara formal memperoleh perlindungan politik dan kebijakan partisipasi politik perempuan yang jelas. Kebijakan yang mengharuskan partai politik untuk mengakomodasi kepentingan kelompok perempuan dengan memberikan kuota 30 persen dalam posisi legislatif, setidaknya mencerminkan kemauan politik pemerintah yang jelas terhadap partisipasi politik perempuan. Sekalipun hal ini tidak terlepas dari realita bahwa kebijakan

akomodasi kepentingan politik perempuan ini masih bersifat artifisial dan belum substansial.

Ironisnya, tidak banyak kaum perempuan yang secara sukarela dan kesadaran tinggi tertarik dan bersedia terlibat dalam bidang pembangunan lingkungan dan pengembangan ketahanan pangan. Memang keterlibatan perempuan di kedua bidang ini tidak populer dan strategis secara politik. Sebaliknya, cukup banyak kaum perempuan dan organisasi perempuan yang dengan suara lantang berkiprah di bidang pembangunan politik.

Banyak gerakan sosial perempuan yang berubah menjadi gerakan politik agar dapat masuk ke lingkaran kekuasaan. Hal yang sebaliknya terjadi pada banyak gerakan sosial perempuan di bidang lingkungan dan pengembangan ketahanan pangan. Memang argumen yang dibangun kelompok perempuan politik ini awalnya untuk menyuarakan kepentingan perempuan, termasuk mendorong perempuan dalam pembangunan lingkungan dan pengembangan ketahanan pangan. Namun apakah mereka yang telah masuk pusaran politik dan kekuasaan kemudian mempunyai konsistensi dalam memperjuangkan penyelamatan lingkungan dan pengembangan pangan bagi perempuan itu sendiri? Nampaknya belum demikian. Dalam bahasa Greece (1998), keterlibatan perempuan dalam pembangunan lingkungan dan pengembangan ketahanan pangan lebih merupakan akibat tekanan struktural untuk strategi survival, bukan untuk pengembangan kapasitas individual maupun organisasi.

Untuk kepentingan masa depan, keterlibatan perempuan dalam pembangunan lingkungan dan pengembangan ketahanan pangan sangat memerlukan affirmative policy dan rencana aksi yang nyata. Perempuan tidak lagi boleh dinabobokan dengan berbagai slogan yang pada ujung-ujungnya tetap berkuat pada "kasur, dapur dan sumur". Perempuan di masa depan juga tidak boleh dimasukkan dalam perangkap sosial yang mempunyai tahapan: lahir dari rahim ibunda tersayang, hidup dalam tirai jendela rumah tangga yang membelenggu, dan berakhir di ranah domestik yang terlupakan.

Prinsip pembangunan dan perempuan, atau pembangunan untuk perempuan harus diubah menjadi "pembangunan oleh perempuan". Perubahan ini memang mensyaratkan berbagai hal, termasuk di dalamnya kesediaan kaum perempuan itu sendiri berperan dalam banyak bidang, tidak hanya di bidang politik yang secara finansial memang "menggiurkan" dan secara sosial dipandang mempunyai privilese yang istimewa.

Jikalau kita sepakat bahwa bidang lingkungan adalah ranah berpijak yang penting

dalam tata kehidupan dan pengembangan ketahanan pangan merupakan ranah strategis untuk berpijak dalam penghidupan, nampaknya keterlibatan dan peran perempuan dalam kedua bidang tersebut menjadi tuntutan yang niscaya.

Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan mensyaratkan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan makan. Dan, ini tidak mudah dipenuhi oleh pemerintah akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi (1,38%), sehingga terjadi penambahan sekitar 4,5 juta orang per tahun pada populasi Indonesia. Sebagai catatan, jumlah penduduk Singapura hanya sekitar 3 juta orang saja, sehingga perbandingan ini bisa sedikit banyak menggambarkan sulitnya tugas dan tanggungjawab pemenuhan kebutuhan pangan rakyat oleh pemerintah Indonesia, yang memikul beban terlalu berat. Akibatnya, Indonesia kemudian masuk dalam perangkat food trap, karena ketergantungan yang tinggi terhadap pangan impor.

Cara melepaskan Indonesia dari ketergantungan pangan menurut Irianto dan Khomsan (2008) ada dua macam, yaitu: (1) Menggunakan produk pangan lokal untuk menciptakan ketahanan pangan lokal; (2) Menurunkan ketergantungan atas bahan pangan utama gandum.

Dalam kaitan tujuan itulah maka erat relevansinya dengan Program Penanaman 10 Juta Pohon yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2007. Di tingkat Jawa Tengah pada tanggal 1 Desember 2008 di Desa Bade, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali dilaksanakan acara puncak Aksi "Gerakan Perempuan Tanam, Tebar dan Pelihara" (GBTTP), sekaligus menandai implementasi Gerakan Indonesia Menanam di Bulan Desember oleh Departemen Kehutanan, menyusul pencanangan Hari Indonesia Menanam pada tanggal 28 November 2008.

Dalam wawancara dengan RRI Semarang akhir November 2008, Ibu Bibit Waluyo menerangkan bahwa gerakan ini merupakan gerakan nasional keluarga dan masyarakat untuk menanam dan memelihara pohon serta menebar dan memelihara ikan, demi tujuan ketahanan pangan dan kesehatan keluarga. Maksud kegiatan ini adalah membangun kesadaran perempuan dalam ketahanan pangan berbasis kearifan lokal, serta mendorong perempuan dan keluarga terutama generasi muda untuk mencintai keanekaragaman hayati Indonesia.

Menurutnya, perempuan yang menurut fitrahnya adalah pemelihara diharapkan aktif dalam kegiatan swadaya penanaman dan pemeliharaan

tanaman. Organisasi-organisasi yang dilibatkan adalah BKOW, Dharma Pertiwi, Bhayangkari, dan Dharma Wanita Persatuan. Terkait erat pula adalah program Gubernur Jawa Tengah "Bali Ndeso Mbangun Deso". Dengan demikian perempuan diharapkan selain memberdayakan dirinya sendiri juga berpartisipasi dalam implementasi kebijakan pemerintah. Ketahanan pangan lokal amat perlu digalakkan. Gandum jelas bukan tanaman Indonesia sehingga seratus persen harus diimpor, akan tetapi konsumsi roti dan mi rakyat Indonesia amat besar, dan semakin meningkat dari hari ke hari karena perubahan selera dan gaya hidup. Terigu amat mendominasi pangan non beras, sehingga tingkat kerawanan pangan kita terhadap produk terigu amat tinggi. Belum lagi produk-produk lain seperti susu dan daging. Apa yang akan terjadi seandainya terdapat hambatan atau terhentikannya impor?

Oleh karena itulah maka tanaman yang amat dianjurkan untuk ditanam di Indonesia adalah tanaman lokal yang bisa menghijaukan lingkungan, dan sekaligus bisa digunakan sebagai sumber pangan, seperti sukun misalnya. Produk tepung non terigu berbasis komoditas lokal, utamanya umbi-umbian, juga perlu dikembangkan agar kompetitif terhadap gandum. Umbi-umbian juga amat layak dijadikan bahan makanan pokok. Harus ditingkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk tidak hanya mengkonsumsi nasi sebagai satu-satunya makanan pokok, karena jenis-jenis bahan makanan lain juga amat potensial ditanam, dikembangkan, dan dihidangkan secara menarik untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga.

Ketergantungan pada nasi merupakan akibat dari berbagai kebijakan pemerintah. Ketika kemudian orang menganggap nasi sebagai sumber paling utama pangan, adalah merupakan wujud dampak negatif digalakkannya penanaman padi dalam implementasi kebijakan swasembada pangan, dan kini karena kebijakan pembagian beras untuk orang miskin (raskin). Diversifikasi pangan lokal menjadi terabaikan, kearifan lokal yang terefleksikan pada konsumsi bahan pangan lokal menjadi tidak menarik lagi. Ketahanan pangan lokal menjadi terganggu, kondisi yang berbahaya bagi ketahanan pangan yang menuntut ketersediaan dan keanekaragaman pangan yang tinggi.

Di NTT misalnya, masyarakat lebih senang membeli raskin daripada harus bersusah payah menanam jagung dan ubi yang selama ini menjadi bahan makanan pokok mereka. Tanpa terasa, bantuan raskin ternyata berdampak memperlemah daya tahan masyarakat lokal untuk bertahan dengan bahan pangan lokal. Dampak itu bahkan

bisa berlanjut lebih jauh lagi, berimplikasi pada kerawanan sosial yaitu kemiskinan. "Kami jadi tambah miskin karena raskin" kata seorang ibu di NTT (Jurnal Perempuan No. 24, 2005).

C. PENUTUP

Dalam kaitan inilah maka peran perempuan menjadi amat penting. Perempuan adalah manajer rumah tangga, yang peran dan tindakannya sangat strategis dalam gerakan menjaga lingkungan yang merupakan prasyarat ketersediaan pangan, dan dalam usaha penguatan ketahanan pangan. Apalagi ketika perempuan tidak hanya bergerak secara individual, akan tetapi juga dengan kekuatan institusional. Tidak mustahil modal sosial ini kemudian muncul menjadi roda penggerak.

Berlawanan dengan tesis Greece sebagaimana dikutip di atas, pengembangan ketahanan pangan kemudian tidak lagi merupakan akibat tekanan struktural untuk strategi *survival*, akan tetapi kemudian berkembang untuk peningkatan kapasitas individual dan organisasi. Manakala gerakan ini berkembang, dampaknya harga diri bangsa kemudian terangkat, ketika ketergantungan pangan yang sudah berupa perangkap, bisa terbebaskan. Belenggu ketergantungan pangan, bisa terlepas!

Daftar Pustaka

Amiruddin, Mariana dan Lita Purnama, "Tragedi 'Kelaparan Nasional' dan Feminisasi Kemiskinan", dalam *Jurnal Perempuan Volume 42, Th 2005*.

Greece, Patricia, 1998, *The Woman and Development*, New Jersey : Princeton University Press.

Hayami, Yusohiro and Nagami Kikuchi, 1987, *Dilema Ekonomi Desa*, terjemahan, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Iriyanto, Gatot, "Keluar dari Perangkap Pangan?", *Kompas*, 4 September 2008.

Khomsan, Ali, "Ketahanan Pangan vs Jalan Tol", *Kompas*, 20 November 2008.

Mantra, Ida Bagoes, 2003, *Demografi Umum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Mardijana, Desti, "Kasus Busung Lapar di NTT Bukan Hanya Faktor Kemiskinan, Tetapi Juga Pengabaian Terhadap Hak-hak Perempuan", *Jurnal Perempuan, Volume 42, 2005*.

Purnaweni, Hartuti, 1993, "Peran Perempuan dalam Sektor Pertanian", *FORUM, Jurnal FISIPUNDIP*.

Shiva, Vandhana, 1991, *The Violence of the Green Revolution*, Penang : Third World Network.

Todaro, Michael, 1990, *Economics for a Developing World*, Quezon City : Phoenix Press, Inc.

USAID and GTZ, 2004, *Women and Food : Institutionalization of Rural Wealth Program*, Jakarta.

Vanek, Jaroslav, 1989, *The Participatory Economy : A Strategy for Development*, Ithaca : Cornell University Press.

"Murniwati, dari *Nol Mencintai Bakau*", *Kompas*, 8 Desember 2007.